

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025



## RENJA TAHUN 2025



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Payakumbuh**



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

#### Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

#### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang bersifat indikatif.

## Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023;
  - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. dinas pendidikan;
  - b. dinas kesehatan;
  - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
  - f. badan penanggulangan bencana daerah;
  - g. dinas sosial;
  - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
  - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - j. dinas ketahanan pangan;
  - k. dinas lingkungan hidup;
  - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  - m. dinas perhubungan;
  - n. dinas komunikasi dan informatika;
  - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
  - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
  - s. dinas pertanian;
  - t. sekretariat daerah;
  - u. sekretariat dprd;
  - v. badan perencanaan pembangunan daerah;
  - w. badan keuangan daerah;
  - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - y. inspektorat;
  - z. kecamatan payakumbuh utara;
  - aa. kecamatan payakumbuh barat;
  - bb. kecamatan payakumbuh timur;
  - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
  - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
  - ee. kantor kesbangpol.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 5 Agustus 2024



Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 13

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.3.1 Maksud.....	I-5
1.3.2 Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda.....	II-1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-38
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda.....	II-40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	III-5
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-5
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025</b>	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	IV-1
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	V-1

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 2.1	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023.....	<b>II-2</b>
TABEL 2.2	KINERJA PELAYANAN .....	<b>II-39</b>
TABEL 2.3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	<b>II-43</b>
TABEL 2.4	PERSANDINAGN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2022 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	<b>II-62</b>
TABEL 2.5	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 KOTA PAYAKUMBUH.....	<b>II-62</b>
TABEL 3.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU 2026.....	<b>III-8</b>
TABEL 4.1	RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2025.....	<b>IV-2</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

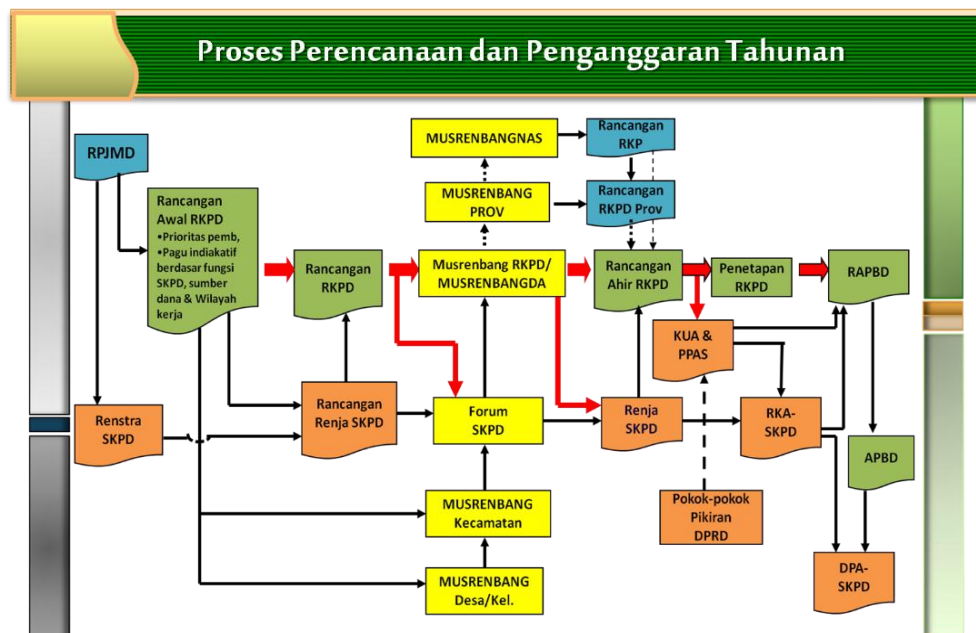
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bappeda Kota Payakumbuh disusun berdasarkan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2025, Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 serta berpedoman pada Renja Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Rencana Kerja Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Dokumen Rancangan Renja Bappeda Tahun 2025 memperhatikan program prioritas

yang dituangkan dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025 dan telah melalui proses penyusunan dan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Bappeda khususnya tim penyusun Dokumen Rancangan Renja Bappeda Tahun 2025, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah:

**Gambar 1.1**



**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Sukses kepemimpinan ditingkat lokal memiliki keterkaitan erat dengan proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka perlu diperhatikan sistem perencanaannya. Sistem perencanaan sesungguhnya harus tersistem dan bersinergi antar daerah dan pusat. Pemahaman ini mengingat implementasi visi dan misi serta janji politik kepala daerah yang terpilih akan diwujudkan secara berjenjang dalam jangka pendek dan jangka menengah. Hal tersebut

akan dituangkan dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan pilkada serentak merupakan momentum untuk mewujudkan perencanaan yang bersinergi. Namun yang harus diperhatikan adalah konsistensi pelaksanaannya dan tidak dipengaruhi oleh dominasi politik rezim yang berkuasa. dengan adanya pilkada serentak maka ada kesamaan waktu dalam proses perencanaan pembangunannya sehingga hal itu bisa disesuaikan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, termasuk antar daerah dengan propinsi maupun pusat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2,);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,);
  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  12. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
  15. Peraturan Daerah Kota 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010–2030 (Lembaran

- Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45)
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
  17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
  18. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);
  19. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 9);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Dokumen Rancangan Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu meliputi urusan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana 2025 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda untuk dimasukkan dalam dokumen KUPA-PPAS Tahun 2025 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Bappeda Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Bappeda Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Bappeda Tahun 2025;
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat :

- a. Latar belakang,
- b. maksud dan tujuan,
- c. landasan hukum, dan
- d. sistematika penulisan.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.1 Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu Renja Bappeda Kota Payakumbuh juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja Bappeda Kota Payakumbuh meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Bappeda Kota Payakumbuh memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaannya.

Penyusunan Renja Bappeda Kota Payakumbuh juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit	unit		unit		unit		unit	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																BAPPEDA	
		PERENCANAAN			51,961,619,722	7,750,173,339	8,059,669,705			7,506,235,497		7,506,235,497				14.45%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	89.5	46,569,089,391	88.16	6,207,277,465	89	6,403,568,995		89,39	5,940,378,271	-	5,940,378,271	-	12.76%			
			Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A		AA		A			A								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan	100	%	381,258,909	100.00%	141,619,500	100.00%	106,405,330	100.00%	104,357,950	100.00%	104,357,950	100.00%	27.37%			

Sasaran	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		8		9=8			10 = 8 / 5 X 100
				K		Rp	K	Rp	K	Rp		K	K	Rp	K		Rp
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit	unit					
			<b>Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja</b>	100	%	-	100.00 %	-	100.00 %	-	100.00 %		100.00 %		100.00 %		
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5 dokumen	11,505,250	5 dokumen	9,918,490	2 dokumen	5 dokumen	9,225,000	5 dokumen	9,225,000	20,00	
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				6 laporan	130,114,250	6 laporan	96,486,840	3 laporan	6 laporan	95,132,950	6 laporan	95,132,950	16,67	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>39,851,252,465</b>	<b>93.04 %</b>	<b>4,393,455,166</b>	<b>97.20 %</b>	<b>4,830,276,443</b>		<b>95.07 %</b>	<b>4,444,094,049</b>	<b>188.11 %</b>	<b>4,444,094,049</b>	<b>13.75 %</b>	<b>11.15 %</b>
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				38 orang	4,393,455,166	39 orang / bulan	4,577,220,443	39 orang / bulan	39 orang / bulan	4,191,848,549		4,191,848,549	100	
	2	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi						1 dokumen	253,056,000	1 dokumen	1 dokumen	252,245,500		252,245,500		

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit	unit		unit		unit			
			pelaksanaan tugas ASN																
												-							
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pensentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>406,599,915</b>	<b>-</b>	<b>50,381,250</b>	<b>100.00 %</b>	<b>23,909,400</b>		<b>100.00 %</b>	<b>23,909,400</b>	<b>100.00 %</b>	<b>23,909,400</b>	<b>100.00 %</b>	<b>5.88%</b>		
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				45 stel	23,726,250	39 paket	23,909,400	39 paket	39 paket	23,909,400	-	23,909,400	-			
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				20 orang	26,655,000	30 orang	-			-	-	-	-			
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan umum Bappeda sesuai</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,326,243,734</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1,049,330,136</b>	<b>100%</b>	<b>769,198,850</b>		<b>100.00 %</b>	<b>752,622,979</b>	<b>100.00 %</b>	<b>752,622,979</b>	<b>100.00 %</b>	<b>22.63 %</b>		

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7			8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit			unit		unit		unit	unit
			standar																
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan				2 jenis 5,084,000	1 paket 5,551,950	1 paket 5,551,950	1 paket 5,551,950	1 paket 5,129,600	2 jenis 5,129,600	2 jenis 5,129,600						
	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				18 unit 331,060,000					-							
	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				2 item 4,700,000					-							
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan				69 jenis 33,160,400	1 paket 31,623,900	1 paket 31,623,900	1 paket 31,623,900	1 paket 28,492,200	120 jenis 28,492,200	120 jenis 28,492,200						

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit	unit		unit					
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				8 jenis; 30798 lembar; 10 buku; 100 meter;	14,888,950	1 paket	18,662,880	1 paket	1 paket	16,287,500	18 jenis; 54 buku dan 100.000 lembar	16,287,500				
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				3347 lembar	16,800,000	48 dokumen	20,487,720	12 dokumen	48 dokumen	19,210,000	6.694 lembar	19,210,000				
	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				100 porsi	3,470,500	150 porsi	2,800,000	3 porsi	21 porsi	2,791,800	160 porsi	2,791,800				

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7			8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit		unit	unit		unit			
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				55 kali; 20 kali	579,915,036	48 laporan	620,492,000	12 laporan	48 laporan	620,430,779	96 kali; 30 kali	620,430,779				
	9	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 website	60,251,250	1 dokumen	69,580,400	1 dokumen	1 dokumen	60,281,100	1 website	60,281,100				
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>490,562,065</b>	<b>100.00 %</b>	<b>64,450,000</b>	<b>80%</b>	<b>247,641,000</b>		<b>80.00 %</b>	<b>226,004,000</b>	<b>80.00 %</b>	<b>226,004,000</b>	<b>80.00 %</b>	<b>46.07 %</b>		

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5		6		7				8	8		9=8	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit	unit		unit		unit
	1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			2 unit	44,360,000	3 unit	93,129,000		3 unit	85,150,000		85,150,000		
	2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			5 unit	20,090,000	9 unit	154,512,000		9 unit	140,854,000	9 unit	140,854,000	-	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>749,859,445</b>	<b>100.00 %</b>	<b>164,202,703</b>	<b>100%</b>	<b>171,956,392</b>	<b>100.00 %</b>	<b>168,045,593</b>	<b>100.00 %</b>	<b>168,045,593</b>	<b>100.00 %</b>	<b>22.41 %</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1 buku; 84 lembar	1,400,000	12 laporan	2,376,500	3 laporan	6 laporan	2,370,000	365 lembar ; 20 buku	2,370,000	12.50 %	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			4 rekenin	53,966,073	12 laporan	57,887,000	3 laporan	6 laporan	56,049,319	8 rekenin	56,049,319	50%	
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan			4 orang	108,836,630	12 laporan	111,692,892	3 laporan	6 laporan	109,626,274	8 orang	109,626,274	50%	

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8	8		9=8		10 = 8 / 5 X 100			
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K		Rp
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit	unit						
			umum kantor yang disediakan															
												-						
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>	<b>80.00%</b>		<b>1,363,312,858</b>	<b>100.00%</b>	<b>343,838,710</b>	<b>80%</b>	<b>254,181,580</b>		<b>80.00%</b>	<b>221,344,300</b>	<b>80%</b>	<b>221,344,300</b>	<b>80.00%</b>	<b>16.24%</b>	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya				1 unit	38,896,750	1 unit	39,190,000	1 unit	1 unit	39,103,750	2 unit	39,103,750	50%		
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				26 unit	151,698,400	26 unit	179,300,000	6 unit	12 unit	155,880,150	39 unit	155,880,150	50%		

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7			8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit		unit			unit		unit	unit
			a pemeliharaan dan dibayar pajaknya																
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				25 unit	18,140,390	26 unit	19,810,000	6 unit	12 unit	10,596,800	22 unit	10,596,800	50%			
	4	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket rehab gedung kantor				1 paket	135,103,170	1 paket	15,881,580			15,763,600	1 paket	15,763,600	-			
						-		-		-			-		-				
		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan</b>	<b>25</b>	<b>nilai</b>	<b>3,955,118,441</b>	<b>20,91 %</b>	<b>847,326,470</b>	<b>25</b>	<b>nilai</b>	<b>1,140,066,590</b>	<b>24.73</b>	<b>1,070,535,868</b>	<b>20,91 %</b>	<b>1,070,535,868</b>	<b>20,91 %</b>	<b>27.07 %</b>		
			<b>Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja</b>	<b>13</b>	<b>nilai</b>				<b>13</b>	<b>nilai</b>		<b>12.39</b>							

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8	8		9=8		10 = 8 / 5 X 100			
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K		Rp
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit	unit						
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD	100	%	1,924,621,495	-	807,848,300	100%	878,659,770		100.00%	834,531,700	100.00%	834,531,700	100.00%	43.36%	
			Persentase pagu belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	18.5	%	-	-	-	-	-		7.70%						
	1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					2 dokumen	27,940,900					-					

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7			8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit			unit					
	2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik				220 orang	35,066,280	1 berita acara	48,912,850	1 berita acara	1 berita acara	41,709,000	100 orang	41,709,000	50%			
	3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten / kota				1 hari	89,376,850	1 berita acara	77,987,000	1 berita acara	1 berita acara	75,562,150	2 hari	75,562,150	100			
	4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan				5 bahan; 47 orang	17,810,540	5 bahan ; 47 orang	18,708,500		5 bahan; 47 orang	18,379,000	5 bahan	18,379,000	-			

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7			8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit			unit			unit		
	5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota yang ditetapkan ( RPJPD / RPJMD / RKPD )				3 dokumen	637,653,730	3 dokumen	733,051,420	1 dokumen		698,881,550	4 dokumen	698,881,550	-			
		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah</b>	<b>98.5</b>	<b>%</b>	<b>941,657,083</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>87,5%</b>	<b>17,705,300</b>		<b>98.50 %</b>	<b>17,267,590</b>	<b>98.50 %</b>	<b>17,267,590</b>	<b>98.50 %</b>	<b>1.83%</b>		
	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisa data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah				1 dokumen	122,214,730	1 dokumen	17,705,300			17,267,590	1 dokumen	17,267,590	-			
	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan					2 dokumen ; 2 orang	199,078,724											

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab			
				5			6		7				8	8		9=8		10 = 8 / 5 X 100		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit		unit	unit		unit		unit		
		Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD																		
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%	93.55	%	196,220,574	90.32	%	39,478,170	93.55	%	96,322,250	0.00%	84,964,730	90.32	%	84,964,730	-	43.30	%
			Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel	97.00	%	-	96.20	%	-	96.84	%	-	97.00	%	97.00	%	-	-	-	-
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan						1 dokumen	59,693,000				51,318,855						
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan				1 dokumen	39,478,170	1 dokumen	36,629,250			33,645,875	2 dokumen	33,645,875	50%				

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7			8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit								unit
		Pembangunan Daerah	an daerah																
												-							
		<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan</b>	<b>71.43</b>	<b>%</b>	<b>892,619,29</b>			<b>71.43</b>	<b>%</b>	<b>147,379,270</b>		<b>133,771,848</b>		<b>133,771,848</b>		<b>14.99</b>	<b>%</b>	
			<b>Tingkat aksesibilitas data</b>	<b>100</b>	<b>%</b>				<b>100%</b>										
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah							120,366,870			110,978,748		110,978,748				
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah							27,012,400			22,793,100		22,793,100				

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		8		9=8		10 = 8 / 5 X 100		
				unit	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K
		Pemerintah Kabupaten / Kota	di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten / kota															
		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD</b>	100	%	1,437,411,890	98.20 %	695,569,404	100%	516,034,120	100.00 %	495,321,358	100.00 %	495,321,358	100.00 %	34.46 %		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya	100	%	1,202,896,978	43.90 %	389,848,864	100%	279,628,400	100.00 %	276,114,804	100.00 %	276,114,804	100.00 %	22.95 %		
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang	100	%						100.00 %		100.00 %		100.00 %			

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit	unit		unit		unit		unit	
			sosial budaya																
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan				2 kali rapat	7,197,480	4 kali rapat	36,805,500	1 dokumen	2 dokumen	35,092,304	8 kali rapat	35,092,304	-			
	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					2 kali	6,711,600											
	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi bidang pembangunan manusia yang dilaksanakan					-	16 perangkat daerah	12,600,150	16 perangkat daerah	16 perangkat daerah	12,409,550	8 kali.	12,409,550	-			

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7			8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit		unit						
	4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 pelaporan	49,829,130					-		-					
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 dokumen	326,110,654	1 dokumen;	230,222,750	1 dokumen	2 dokumen	228,612,950	2 dokumen; 8 kali rapat	228,612,950	-				
												-							
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase konsistensi program RKPD terkait bidang ekonomi terhadap program</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>48,699,977</b>	<b>28,96 %</b>	<b>10,832,650</b>	<b>100%</b>	<b>15,642,000</b>	<b>100.00 %</b>	<b>15,230,150</b>	<b>100.00 %</b>	<b>15,230,150</b>	<b>100.00 %</b>	<b>31.27 %</b>			

Sasaran	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7			8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit			unit			unit		
			RPJMD																
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 kali	5,314,000						-						
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra / renja bidang perekonomian					7 perangkat daerah	9,977,200.00			9,703,850		9,703,850					

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit	unit		unit		unit			
	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 kali	5,518,650					-							
	4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra / renja bidang perekonomian					7 perangkat daerah	5,664,800		7 perangkat daerah	5,526,300		5,526,300					
												-							
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>185,814,935</b>	<b>27,80 %</b>	<b>294,887,890</b>	<b>100.00 %</b>	<b>220,763,720</b>	<b>100%</b>	<b>203,976,404</b>	<b>100.00 %</b>	<b>203,976,404</b>	<b>100.00 %</b>	<b>109.77%</b>			

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit	unit		unit					
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%				100.00 %		100%	-	100.00 %		100.00 %				
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD )				4 kali ; 1 kali ; 1 kali	7,991,340		0		-	4 kali		-				
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra / renja bidang						8 perangkat daerah	8,559,700	1 dokumen	8 perangkat daerah	8,121,800		8,121,800				

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit	unit		unit		unit		unit	
			infrastruktur																
	3	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring Dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang IPW					8 perangkat daerah	22,998,600	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	22,769,750		22,769,750					
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur				4 kali; 10%	196,718,750	1 laporan	189,205,420	8 perangkat daerah	1 laporan	173,084,854	8 kali	173,084,854	-			

Sasaran	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7			8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit			unit			unit		unit
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 kali	90,177,800					-							
		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>1,004,216,562</b>	<b>100%</b>	<b>469,098,250</b>	<b>95.00%</b>	<b>479,539,190</b>		<b>0.00%</b>	<b>457,293,001</b>	<b>-</b>	<b>457,293,001</b>	<b>-</b>	<b>45.54%</b>		
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah kegiatan kelitbangan di Kota Payakumbuh</b>	<b>95</b>	<b>kegiatan</b>	<b>108,740,849</b>	<b>100%</b>	<b>74,651,560</b>	<b>90%</b>	<b>104,655,850</b>		<b>0.00%</b>	<b>84,694,960</b>		<b>84,694,960</b>		<b>77.89%</b>		
	1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen penelitian bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun				1 dokumen	74,651,560	1 dokumen	104,655,850			84,694,960	1 dokumen	84,694,960				

Sasaran	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7				8	8		9=8	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit		unit	unit		unit	
											-						
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah rekomendasi hasil kelibngan yang ditindaklanjuti	1	rekomendasi	125,085,191	100%	87,084,640	95%	128,482,450	0.00%	127,043,585	97.5	127,043,585		101.57%	
	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen penelitian bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun				1 dokumen	87,084,640	1 dokumen	128,482,450		127,043,585	1 dokumen	127,043,585			
											-						
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	%	770,390,522	100.00%	307,362,050	100%	246,400,890	100.00%	245,554,456	100%	245,554,456	100%	31.87%	

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
				5			6		7			8	8			9=8		10 = 8 / 5 X 100	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp
unit	satuan	unit	unit	unit	unit		unit		unit		unit		unit	unit					
1	1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah fasilitas inovasi & teknologi tepat guna daerah				31 opd	255,759,450	2 laporan	246,400,890		2 laporan	245,554,456		245,554,456				
	2	Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah inovasi pemerintah daerah yang di diseminasikan/ di sosialisasikan				2 inovasi	26,664,800											
	3	Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang di diseminasikan				1 dokumen	24,937,800											
<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program</b>												<b>8,539,208,895</b>		<b>7,963,528,498</b>		<b>7,963,528,498</b>			

Urusan perencanaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, dimana target kinerja programnya telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator :

- a. Nilai IKM. Target kinerja pada tahun 2023 adalah 89,5 dengan realisasi 88,39 dan capaian kinerja 99,88%.
- b. Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat. Target kinerja pada tahun 2023 adalah A dengan realisasi A dan capaian kinerja 100%.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yaitu;

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan 5 (lima) dokumen perencanaan dan pelayanan publik yaitu Renja perubahan 2023, Renja 2023, Survey Kepuasan Masyarakat 2 semester Tahun 2023 dan SPIP dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 9.918.490,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.225.000 atau 93,01%.
  - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan 6 laporan kinerja perangkat daerah yaitu laporan triwulan I, II, III, dan IV, LKPJ, LKJIP dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.96486.840 dan terealisasi sebesar Rp. 95.132.950 atau 98,60%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Sub Kegiatan ini berupa pembayaran gaji, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan target 39 orang ASN dan terealisasi sebanyak 37 orang

ASN dengan capaian kinerja 94,87%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 4.577.220.443 dan terealisasi sebesar Rp. 4.191.848.549 atau 91,58 %.

2) Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa Sub Kegiatan ini berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengadaan pada bappeda dengan target 1 dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%, dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.253.056.000 dan terealisasi sebesar Rp. 252.245.500 atau 99,68 %

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas bagi ASN Bappeda dengan target 45 paket pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan dan terealisasi sebanyak 45 paket dengan capaian 100% dilaksanakan alokasi anggaran Rp 23.909.400 dan terealisasi sebesar Rp. 23.909.400 atau 100%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Payakumbuh, berupa penyediaan pengadaan baterai dan lampu dengan target sebanyak 1 paket dan terealisasi dengan capaian kinerja 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.623.900,- dan terealisasi sebesar Rp 28.492.200,- atau 90,10%.

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan bahan logistik kantor berupa air galon isi ulang, hand sanitizer, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, alat tulis kantor dan alat kebersihan kantor dengan target 1 paket Bahan logistik kantor yang disediakan dan

teralisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.401.710,- dan terealisasi sebesar Rp 33.160.400,- atau 91,10%

3) Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan berupa penyediaan barang cetak (Amplop dinas, kop surat logo, memo, kop dinas, map kop dinas, lembar disposisi, kwitansi NCR, BKU NCR, SPP/SPM), penggandaan dan penjilidan dan cetak spanduk dengan target sebanyak 1 paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.584.040,- dan terealisasi sebesar Rp 16.287.500,- atau 87,27%

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan 1 jenis surat kabar nasional yaitu Kompas dan 2 jenis surat kabar lokal yaitu Padang Ekspres dan Singgalang serta 1 jenis majalah mingguan yaitu Majalah Tempo sebanyak dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan sebanyak 48 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.487.720,- dan terealisasi sebesar Rp 19.210.000,- atau 93,76%

5) Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan ini berupa Penyediaan Makan dan Minum tamu berupa penyediaan makan dan minum tamu tamu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 12 laporan fasilitasi kunjungan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%.. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.791.800,- atau 99,71%

6) Penyelenggaraan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dengan target 48 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan

- konsultasi SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 620.492.000,- dan terealisasi sebesar Rp 620.430.779,- atau 99,99%
- 7) Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Sub Kegiatan ini berupa pengelolaan website Bappeda, dengan target 1 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.580.400,- dan terealisasi sebesar Rp 60.281.100,- atau 86,64%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
- 1) Pengadaan Mebel
- Sub kegiatan ini berupa pengadaan kursi kerja, kursi rapat dan meja rapat, dengan target 3 unit dan terealisasi sebanyak 3 unit dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp. 93.129.000,- dan terealisasi Rp. 85.150.000,- atau 91,43%
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub kegiatan ini berupa pengadaan printer, komputer sebanyak 9 unit dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan dengan alokasi Rp. 154.512.000,- dan terealisasi Rp. 140.854.000,- atau 91,16%.
6. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan ini berupa penyediaan jasa surat menyurat dalam bentuk penyediaan materai dengan target 12 laporan penyediaan jasa surat menyurat dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 2.376.500,- dan terealisasi sebesar Rp 2.370.000,- atau 99,73%.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan ini berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 12

laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 57.887.000,- dan terealisasi sebesar Rp 56.049.319,- atau 96,83%.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan jasa tenaga harian lepas yang terdiri dari penyediaan jasa sopir kepala badan dan penyediaan jasa tenaga lainnya (kebersihan dan penjaga malam) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 12 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 111.692.892,- dan terealisasi sebesar Rp 109.626.274,- atau 98,15%.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan pelumas kendaraan dinas roda empat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 unit kendaraan dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp 39.103.750,- atau 99,78%

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan pelumas kendaraan dinas roda empat sebanyak 5 unit dan 21 unit untuk kendaraan dinas roda dua pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 179.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 55.880.150,- atau 86,94%.

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini berupa servis komputer, pendingin ruangan (AC), Laptop, printer dengan target 26 unit dan terealisasi sebanyak 14 unit dengan capaian kinerja 53,85%. dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.810.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.596.800,- atau 53,49%. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan karena peralatan dan mesin diusulkan untuk penghapusan aset.

- 4) Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  
Sub Kegiatan ini berupa rehabilitasi gedung kantor Bappeda dengan target 1 paket rehap gedung kantor dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%., dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.763.600,- dan terealisasi Rp. 15.763.600,- atau 99,26%.

#### **b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator :

- a. Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan. Target kinerja pada tahun 2023 adalah 25 dengan realisasi 24,73 dan capaian kinerja 98,92%.
- b. Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja. Target kinerja pada tahun 2023 adalah 13 dengan realisasi 12,39 dan capaian kinerja 95,31%.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :

##### 1) Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sub Kegiatan ini berupa Forum Konsultasi Publik unuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD 2024 dan RPJPD 2025 – 2045 yang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat dengan target 2 berita acara dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.912.850,- dan terealisasi sebesar Rp 41.709.000,- atau 85,27%

2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan ini berupa forum antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan perangkat daerah dan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota untuk mendapat masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD kota Payakumbuh dengan target 1 berita acara dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77.987.000,- dan terealisasi sebesar Rp 75.562.150 atau 96,89%.

3) Penyiapan Bahan Musrenbang Kecamatan

Sub Kegiatan ini berupa penyiapan bahan dan usulan untuk pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan target 5 bahan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.708.500,- dan terealisasi sebesar Rp 18.379.000,- atau 98,24%.

4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 dan dokumen perubahan renja pemerintah daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 dan dokumen teknokratik RPJPD Kota Payakumbuh 2025-2045 dengan target 3 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.733.051.420,- dan terealisasi sebesar Rp 698.881.550,- atau 95,34%.

2. Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1) Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini berupa konsolidasi data teknis dan Rencana Kegiatan Usulan DAK pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target kinerja 1 dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.705.300,- dan terealisasi sebesar Rp

17.267.590,- atau 97,53%.

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota

Sub kegiatan ini berupa pengendalian laporan evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah dengan target sebesar 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 59.693.000,- dan terealisasi sebesar Rp 51.318.855,- atau 85,97%

2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Sub kegiatan ini berupa evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD, RPJMD dan Rentra perangkat Daerah dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.629.250,- dan terealisasi sebesar Rp 33.645.875,- atau 91,86%.

4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini berupa forum kegiatan pengumpulan data pembangunan daerah yang tertuang dalam Apikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan target 2 dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 120.366.870,- dan terealisasi sebesar Rp 110.978.748,- atau 92,20%.

2) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan ini berupa pelatihan untuk admin SIPD dengan target 3 dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten / kota dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%.

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 27.012.400,- dan terealisasi sebesar Rp 22.793.100,- atau 84,38%.

**c Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator :

- a. Persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD. Target kinerja pada tahun 2023 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
  - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)  
Sub kegiatan ini berupa koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang pemerintahan, terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam rangka pelaksanaan dan pelaporan rencana aksi pencegahan dan jumlah pelaporan HAM yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 4 kali rapat dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.805.500,- dan terealisasi sebesar Rp.35.092.304,- atau 95,35%
  - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia  
Sub kegiatan ini berupa asistensi penyusunan dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang sosial budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 16 Perangkat Daerah dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.12.600.150,- dan terealisasi sebesar Rp 12.409.550,- atau 98,49%.
  - 3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia  
Sub kegiatan ini berupa koordinasi yang optimal dalam

perencanaan penanggulangan kemiskinan, menyamakan persepsi dalam penyusunan instrumen penanggulangan kemiskinan dan koordinasi dan pengendalian program - program penanggulangan kemiskinan dengan target 1 dokumen LP2KD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.222.750,- dan terealisasi sebesar Rp 228.612.950,- atau 99,30%

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini berupa asistensi penyusunan dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 7 Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra / renja bidang perekonomian dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp Rp 9.977.200,- dan terealisasi sebesar Rp 9.703.850,- atau 97,26%

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian

Sub kegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 7 Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi dalam penyusunan renstra / renja bidang perekonomian dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.664.800,- dan terealisasi sebesar Rp 5.526.300,- atau 97,56%.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini berupa asistensi penyusunan dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan

pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 8 perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra / renja bidang infrastruktur dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.559.700,- dan terealisasi sebesar Rp 8.121.800,- atau 94,88%.

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 8 Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring Dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang IPW dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.22.998.600,- dan terealisasi sebesar Rp 22.769.750,- atau 99,00%

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini berupa sinkronisasi dan koordinasi penyusunan dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.188.205.420,- dan terealisasi sebesar Rp 173.084.854,- atau 91,48%.

**d. Program Pengembangan Inovasi Daerah**

Program pengembangan inovasi daerah dengan indikator :

- a. Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan. Target kinerja pada tahun 2023 adalah 95% dengan realisasi 95% dan capaian kinerja 100%.

Program pengembangan inovasi daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Sub kegiatan ini berupa peningkatan kualitas penelitian bidang pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 104.655.850,- dan terealisasi sebesar Rp 84.694.960,- atau 80,93%.

2). Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub kegiatan ini berupa peningkatan kualitas penelitian bidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh. Target kegiatan ini berupa 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 128.482.450,- dan terealisasi sebesar Rp 127.043.585,- atau 98,88%.

3). Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1) Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi

Sub kegiatan ini berupa kegiatan motivasi inovasi dan pendampingan untuk inovasi unggulan pada perangkat daerah dengan target 2 laporan hasil fasilitasi inovasi & teknologi tepat guna daerah dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 246.400.890,- dan terealisasi sebesar Rp 245.554.456,- atau 99,66%.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Cara menentukan capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh adalah berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh,

Kedudukan Bappeda adalah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu maka tugas pokoknya adalah perumusan kebijakan pembangunan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan hasil perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam menganalisa kinerja pelayanan Bappeda didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Payakumbuh 2023-2026. Adapun analisis kinerja Bappeda, Capaian kinerja secara umum dari 2 indikator kinerja utama Bappeda Kota Payakumbuh, indikator indek kualitas perencanaan dengan status capaian “sangat tinggi”. Untuk persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat dengan status tinggi karena keterbatasan fiskal daerah terjadi penurunan jumlah usulan yang diusulkan masyarakat dalam Musrenbang, selain itu kebijakan pusat yang menetapkan mandatory spending sehingga alokasi penggunaan pendapatan daerah sudah ditetapkan. Untuk capaian indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan sudah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu daerah kategori inovatif dengan nilai indeks inovasi daerah 41,47. Capaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh disajikan pada tabel, sebagai berikut;



Tabel 2.2  
KINERJA PELAYANAN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Bappeda				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks kualitas perencanaan			√	Indeks	90%	90,5%	91%	91,5%	90%				90%	90,5%	
2	Kategori tingkat inovasi daerah			√	Kategori	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif				Inovatif	Inovatif	

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya.
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
3. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah;
5. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Konsistensi Perencanaan antar waktu diperlukan pendampingan dan koordinasi intensif dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh OPD
2. Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi diperlukan kesamaan pemahaman OPD terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara benjenjang.

3. Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
4. Perkembangan Kota Payakumbuh beserta seluruh permasalahannya diperlukan strategi tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Payakumbuh beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
5. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring perkembangan Kota Payakumbuh. sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kota Payakumbuh juga mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kota Payakumbuh tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan tugasannya adalah dengan :

1. Semakin strategisnya peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
4. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

5. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Kota Payakumbuh sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
- b. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
- c. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
- d. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PERENCANAAN				8,586,209,700	PERENCANAAN				8,586,210,600	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kota Payakumbuh	Nilai IKM	91	7,153,209,700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kota Payakumbuh	Nilai IKM	91	7,158,302,100	
			Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A	15,000,000			Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja	100%	91,625,750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja	100%	91,625,750	
			Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	100%				Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	100%		

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	15,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	15,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	76,625,750.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	76,625,750	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</b>	<b>95%</b>	<b>5,419,468,788</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</b>	<b>95.00%</b>	<b>5,424,562,842</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	5,110,396,888.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang	5,115,490,942	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	309,071,900.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 dokumen	309,071,900	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>26,981,300</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	25,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41 paket	25,932,500	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	1,048,800	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>551,000,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar</b>	<b>100.00%</b>	<b>555,075,150</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	5,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	4,812,050	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	15,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	8,510,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	15,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	10,695,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	15,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	30,103,900	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	14,999,750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	20,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	19,996,200	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3,996,250	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	450,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	449,962,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	12,000,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	12,000,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>		<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>80%</b>	<b>572,925,162</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>		<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>80.00%</b>	<b>603,763,700</b>	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pemerintah Daerah</b>					<b>Pemerintah Daerah</b>					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	372,925,162.00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	482,074,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	150,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	64,438,000	
	<b>Pengadaan Mebel</b>		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	20,000,000.00	<b>Pengadaan Mebel</b>		<b>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</b>	<b>18 paket</b>	25,974,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	30,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	31,277,700	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>187,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar</b>	<b>80%</b>	<b>186,999,358</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		jumlah rekening air, listrik, internet, tlp/fax yang dibayarkan	4 rekening	75,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		jumlah rekening air, listrik, internet, tlp/fax yang dibayarkan	12 laporan	74,999,364	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Air dan Listrik					Air dan Listrik					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	4 orang	112,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	4 orang	111,999,994	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>	<b>296,190,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>	<b>269,294,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39,190,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39,190,000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	197,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	197,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	12,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 unit	<b>19,530,000</b>	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah paket rehab gedung kantor	1 paket	48,000,000.00	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah paket rehab gedung kantor	1 paket	13,574,000	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan</b>	<b>26</b>	<b>995,000,000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>26</b>	<b>989,908,900</b>	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	14					14		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persenta se konsistensi program RKPD terhadap program RPD	100%	833,000,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persenta se konsistensi program RKPD terhadap program RPD	100%	832,999,800	
			Persenta se Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	19,50%				Persenta se Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	19,50%		
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	60,000,000.00	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	60,000,000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	130,000,000.00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	130,000,000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	235 Usulan	18,000,000.00	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	235 Usulan	17,999,800	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	625,000,000.00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	625,000,000	
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah</b>	<b>98.50%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah</b>	<b>98.50%</b>	<b>11,429,600</b>	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	25,000,000.00	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	11,429,600	
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%</b>	<b>93.55%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%</b>	<b>93.55%</b>	<b>58,479,750</b>	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Persenta se data capaian kinerja PD yang akuntabel</b>	<b>97,50 %</b>				<b>Persenta se data capaian kinerja PD yang akuntabel</b>	<b>97,50 %</b>		
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah diKabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	25,000,000.00	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah diKabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	46,090,900	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	25,000,000.00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	12,388,850	
	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan</b>	<b>71,43 %</b>	<b>87,000,000</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan</b>	<b>71,43 %</b>	<b>86,999,750</b>	
			<b>Tingkat Aksebiltas Data</b>	<b>100%</b>				<b>Tingkat Aksebiltas Data</b>	<b>100%</b>		

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	87,000,000.00	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	86,999,750	
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD</b>	<b>100%</b>	<b>438,000,000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD</b>	<b>100%</b>	<b>437,999,600</b>	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya</b>	<b>100%</b>	<b>212,000,000</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya</b>	<b>100.00%</b>	<b>211,999,950</b>	
			<b>Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten selaras bidang sosial budaya</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten selaras bidang sosial budaya</b>	<b>100.00%</b>		

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	112,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	21,307,650	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	100,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	190,692,300	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi</b>	<b>100%</b>	<b>14,000,000</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,999,800</b>	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi</b>	<b>100.00%</b>		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	8,000,000.00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	8,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	6,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	5,999,800	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100.00%</b>	<b>212,000,000</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100.00%</b>	<b>211,999,850</b>	
			<b>Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100.00%</b>				<b>Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100.00%</b>		
	<b>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</b>		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangInfrastruktur	3 Laporan	40,000,000.00	<b>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</b>		<b>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangInfrastruktur</b>	3 Laporan	22,124,250	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	60,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	32,553,300	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	112,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	157,322,300	
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>330,000,000</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>329,999,100</b>	
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>Persentase Hasil kelibatan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan</b>	<b>95.00%</b>	<b>330,000,000</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>95.00%</b>	<b>329,999,100</b>	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		<b>Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>60,000,000</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		<b>Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>59,999,700</b>	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	60,000,000.00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	59,999,700	
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>140,000,000</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>139,999,400</b>	
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	80,000,000.00	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	79,999,700	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	60,000,000.00	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	59,999,700	
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</b>	<b>100%</b>	<b>130,000,000</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</b>	<b>100%</b>	<b>130,000,000</b>	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	15,000,000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	15,000,000	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	1 Laporan	100,000,000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	1 Laporan	100,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Teknologi					Teknologi			
	<b>Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</b>		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	15,000,000	<b>Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</b>		<b>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</b>	1 Laporan	15,000,000	
					<b>8,916,209,700</b>					<b>8,916,209,700</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Payakumbuh.

TABEL 2.4  
 PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG  
 KECAMATAN TAHUN 2022 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Kegiatan Prioritas	Lokasi ( Kelurahan )	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2025	Pagu Indikatif Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>NIHIL</b>						

TABEL 2.5  
 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN  
 2024 KOTA PAYAKUMBUH

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>NIHIL</b>					



## **BAB 3**

### **TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

#### **3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan Nasional tahun 2025 yang dituangkan dalam RKP tahun 2025 menjadi perencanaan dimasa transisi, sehingga dalam perencanaan tahun 2025 tersebut harus dipastikan adanya kesinambungan pembangunan nasional dan daerah serta keberlangsungan pelayanan dasar (baseline planning) dan dapat menyediakan ruang fleksibilitas untuk mengintegrasikan program prioritas pemerintahan baru.

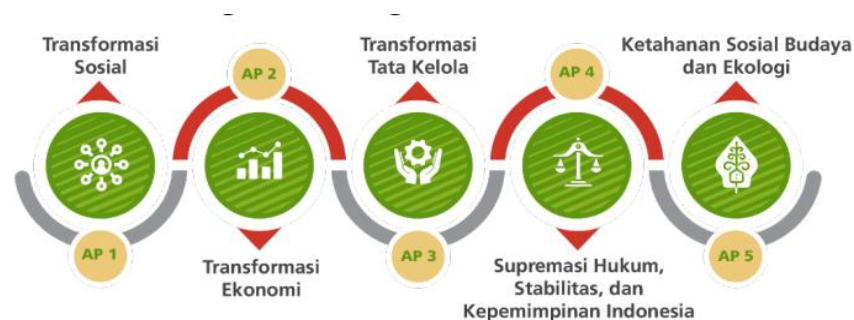
Disamping itu, RKP 2025 juga menjadi kerangka pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Dimana Tahun 2025 merupakan tahun pertama perjalanan panjang transformasi sosial-ekonomi-tata kelola Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas RPJPN 2025-2045 dan menjadi titik tolak tahapan penguatan pondasi transformasi dalam jangka menengah RPJMN 2025-2029.

Dengan melihat pentingnya dasar-dasar transformasi untuk mencapai Indonesia emas, hasil evaluasi multidimensi dan infrastruktur dan capaian kinerja sebelumnya serta perlunya pertumbuhan yang lebih inklusif karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipandang tidak serta merta mampu mengatasi tantangan sosial, untuk itu dibutuhkan pembangunan yang menyasar pada pertumbuhan inklusif melalui transformasi sosial dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka tema RKP tahun 2025 adalah “**akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**”.

Penekanan Tema RKP Tahun 2025 ini akan difokuskan pada:

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas, yaitu SDM yang berdaya saing dan produktif yang akan dicapai melalui upaya:
  - a. Transformasi sosial melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan Science, Technology,

- Engineering, Arts, and Mathematics berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system;
- b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
2. Infrastruktur Berkualitas, yaitu infrastruktur untuk peningkatan produktivitas yang akan dicapai melalui upaya
    - a. Transformasi ekonomi, melalui (a) penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara,
    - b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi, melalui (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
  3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yaitu Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan, yang akan dicapai melalui (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial; (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; (g) peningkatan produksi industri pengolahan; (h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

**Gambar IV.1**  
**Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025**

Selanjutnya kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 berbasis kewilayahan di titik beratkan pada :

**1. Kebijakan Umum,** Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada:

- a. Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah;
  - Penuntasan Rencana Tata Ruang;
  - Optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris;
  - Pengendalian pemanfaatan ruang;
  - Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik;
  - Penguatan fondasi keuangan daerah; dan
  - Percepatan reforma agrarian),
- b. Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan
  - Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun;
  - Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
  - Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
  - Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan;
  - Pengembangan konektivitas dasar;
  - Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam;
  - Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana;
  - Penuntasan konektivitas digital;
  - Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular; dan
  - Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim

**2. Kebijakan Kewilayahan.**

- a. Pembangunan pedesaan and daerah afirmasi
- b. Pengelolaan Pusat Pertumbuhan.
  - Pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan Wilayah Metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didukung dengan konektivitas yang memadai dan kelembagaan yang adaptif;
  - Pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan SDA, agropolitan, wisata alam dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting;

- Penuntasan dan pemanfaatan PSN yang bersifat kawasan melalui percepatan pelaksanaan PSN, evaluasi dan penyiapan *carry over* PSN serta penguatan kerjasama pengelolaan PSN.

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

- Prioritas 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;
- Prioritas 2 : Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- Prioritas 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Prioritas 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penyandang disabilitas;
- Prioritas 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- Prioritas 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- Prioritas 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- Prioritas 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026. Sesuai dengan tugas pokok Bappeda yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah , maka tujuan jangka menengah Bappeda yaitu:

*“Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel”*

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Bappeda Kota Payakumbuh adalah:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan
2. Indeks kualitas perencanaan

### **3.3 Program dan Kegiatan**

- I. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan dan subkegiatan.

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dengan aktivitas intinya adalah mengkoordinasikan perangkat daerah dalam hal perencanaan pembangunan agar mampu menjalin kerjasama dan sinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah, renja Bappeda mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Mempedomani RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat, RPD Tahun 2024-2026 Kota Payakumbuh serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 periode keempat.
- b) Mengkoordinasikan Perangkat daerah dalam berkinerja mencapai visi dan misi Kepala Daerah, namun karena Tahun 2025 merupakan penjabaran RPD Tahun 2023-2026 dimana merupakan tahun transisi menuju pemilihan umum serentak, maka belum ada visi misi Kepala Daerah yang ada adalah tujuan dan sasaran Pembangunan. Sehingga faktor yang dipertimbangkan adalah koordinasi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD.

- c) Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDG's)
  - d) Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai penurunan angka kemiskinan / penanggulangan kemiskinan.
  - e) Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai tujuan dan sasaran organisasinya termasuk amanah pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
  - f) Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai tujuan sasaran Pembangunan dari pendanaan yang bersumber dari selain APBD seperti APBN berupa DAK, APBD Provinsi berupa Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat.
  - g) Mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi internal Bappeda yang dicerminkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - h) Mengkoordinasikan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah.
  - i) Mengkoordinasikan penggunaan sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
  - j) Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan inovasi.
  - k) Tugas dan fungsi Bappeda dalam penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan dan inovasi.
- II. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan subkegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Payakumbuh pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;

- b) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Payakumbuh pada tahun 2025 adalah sebanyak tujuh belas kegiatan, yang terdiri dari tujuh kegiatan penunjang, dan sepuluh kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
  - c) Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Payakumbuh pada tahun 2025 adalah sebanyak empat puluh tujuh sub kegiatan, yang terdiri dari dua puluh lima sub kegiatan penunjang, dan dua puluh dua sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
  - d) Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebesar Rp.8.933.209.700,- yang bersumber dari dana APBD Kota Payakumbuh
- III. Tabel rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan

TABEL 3.1  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode Rekening				Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1				2	3	4	5				11	
5	1				<b>PERENCANAAN</b>							<b>8,586,210,600</b>
5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	Nilai IKM	Kota Payakumbuh	91				7,158,302,100
						Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat		A				-
5	0	0	2.0		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja</b>		100%				91,625,750
						<b>Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda</b>		100%				-

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen	15,000,000.00	DAU		15,000,000
5	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 laporan	76,625,750.00	DAU		76,625,750
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</b>		<b>95%</b>	<b>5,424,562,842.00</b>			5,424,562,842
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 orang	5,115,490,942.00	DAU		5,115,490,942
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		38 dokumen	309,071,900.00	DAU		309,071,900
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>26,981,300.00</b>			26,981,300
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		41 paket	25,932,500.00	DAU		25,932,500

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)
5	0	0	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 orang	1,048,800.00	DAU		1,048,800
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.0</b>	<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar</b>		<b>100%</b>	<b>555,075,150.00</b>			555,075,150
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8 paket	4,812,050.00	DAU		4,812,050
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 paket	8,510,000.00	DAU		8,510,000
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 paket	10,695,000.00	DAU		10,695,000
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		45 paket	30,103,900.00	DAU		30,103,900

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		8 paket	14,999,750.00	DAU		14,999,750
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		48 dokumen	19,996,200.00	DAU		19,996,200
5	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	3,996,250.00	DAU		3,996,250
5	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120 laporan	449,962,000.00	DAU		449,962,000
5	0	0	2.0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen	12,000,000.00	DAU		12,000,000
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>		<b>80%</b>	<b>603,763,700.00</b>			603,763,700

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	482,074,000.00	DAU		482,074,000
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	64,438,000.00	DAU		64,438,000
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		18 paket	25,974,000.00	DAU		25,974,000
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 unit	31,277,700.00	DAU		31,277,700
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar</b>		<b>100%</b>	<b>186,999,358.00</b>			186,999,358
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air, listrik, internet, tlp/fax yang dibayarkan		12 laporan	74,999,364.00	DAU		74,999,364
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia		4 orang	111,999,994.00	DAU		111,999,994

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)
5	0	0	2.0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>		80%	269,294,000.00			269,294,000
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	39,190,000.00	DAU		39,190,000
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		25 unit	197,000,000.00	DAU		197,000,000
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		19 unit	19,530,000.00	DAU		19,530,000
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket rehab gedung kantor		1 paket	13,574,000.00	DAU		13,574,000
5	1	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>26</b>	<b>989,908,900.00</b>			<b>989,908,900</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)
						Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja		14			-
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD		100%	832,999,800.00		832,999,800
						Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat		19,50%			-
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 Berita Acara	60,000,000.00	DAU	60,000,000
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		2 Berita Acara	130,000,000.00	DAU	130,000,000
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		235 Usulan	17,999,800.00	DAU	17,999,800
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		3 Dokumen	625,000,000.00	DAU	625,000,000

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)
5	1	2	2.0 2		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah</b>		<b>98.50 %</b>	<b>11,429,600.00</b>		11,429,600
5	1	2	2.0 2	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	11,429,600.00	DAU	11,429,600
5	1	2	2.0 3		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%</b>		<b>93.55 %</b>	<b>58,479,750.00</b>		58,479,750
						<b>Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel</b>		<b>97,50 %</b>			-
5	1	2	2.0 3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1 Laporan	46,090,900.00	DAU	46,090,900

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)
5	1	2	2.0 3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		2 Laporan	12,388,850.00	DAU		12,388,850
5	1	2	2.0 4		<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan</b>		<b>71,43 %</b>	<b>86,999,750.00</b>			86,999,750
						<b>Tingkat Akseibilitas Data</b>		<b>100%</b>				-
5	1	2	2.0 4	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		3 Dokumen	86,999,750.00	DAU		86,999,750
5	1	3			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>100%</b>	<b>437,999,600.00</b>			<b>437,999,600</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)
5	1	3	2.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya		100%	211,999,950.00		211,999,950
						Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten selaras bidang sosial budaya		100%			-
5	1	3	2.0 1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		16 Dokumen	21,307,650.00	DAU	21,307,650

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	
5	1	3	2.0 1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		3 Dokumen	190,692,300.00	DAU		190,692,300
5	1	3	2.0 2		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persenta se hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi</b>		100%	13,999,800.00			13,999,800
						<b>Persenta se PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi</b>		100%				-
5	1	3	2.0 2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang		3 Laporan	8,000,000.00	DAU		8,000,000

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)
						Perekonomian						
5	1	3	2.0 2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		3 Laporan	5,999,800.00	DAU		5,999,800
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.0 3</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>100.0 0%</b>	<b>211,999,850.00</b>			211,999,850

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	
						<b>Persenta se PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>100.00%</b>				-
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		3 Laporan	22,124,250.00	DAU		22,124,250
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		3 Laporan	32,553,300.00	DAU		32,553,300

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)
5	1	3	2.0 3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		3 Laporan	157,322,300.00	DAU		157,322,300
<b>5</b>	<b>5</b>				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>329,999,100.00</b>			329,999,100
5	5	2			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persenta se Hasil kelitban gan yang dijadi ka n dasar dalam perumusan kebijakan</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>95.0 0%</b>	<b>329,999,100.00</b>			<b>329,999,100</b>
5	5	2	2.0 2		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		<b>1 dokumen</b>	<b>59,999,700.00</b>			59,999,700
5	5	2	2.0 2	1	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		1 Dokumen	59,999,700.00	DAU		59,999,700

Kode Rekening				Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	
5	5	2	2.03		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>139,999,400.00</b>		139,999,400
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1 Dokumen	79,999,700.00	DAU	79,999,700
5	5	2	2.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		1 Dokumen	59,999,700.00	DAU	59,999,700
5	5	2	2.04		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persenta se perangka t daerah yang difasilita si dalam penerapan inovasi daerah</b>		<b>100%</b>	<b>130,000,000.00</b>		130,000,000
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		1 Dokumen	15,000,000.00	DAU	15,000,000

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1 Laporan	100,000,000.00	DAU		100,000,000
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		1 Laporan	15,000,000.00	DAU		15,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>8,916,209,700.00</b>			<b>8,916,209,700.00</b>



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

**4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

TABEL 4.1  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

Kode Rekening				Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)			
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)		
							Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	
5	1			PERENCANAAN										8,623,956,350.00
5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			Nilai IKM	91						7,169,677,250.00
							Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A						
5	0	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase capaian kinerja	100%				91,624,450.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja					Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )		Hasil Kegiatan (Outcome)			
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	
											Persenta se sasaran, progam dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	100%			
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	14,999,000.00
5	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	76,625,450.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2025 (Rp)	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )		Hasil Kegiatan (Outcome)			
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	
5	0	0	2.0		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>5,335,326,746.00</b>
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	5,026,343,946.00
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	308,982,800.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2025 (Rp)	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )		Hasil Kegiatan (Outcome)			
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	
5	0	0	2.0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										<b>44,040,000.00</b>
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket		43,000,000.00
5	0	0	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang		1,040,000.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2025 (Rp)	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )		Hasil Kegiatan (Outcome)			
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	
5	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100%			446,715,850.00
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	4,804,000.00
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	4,379,000.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2025 (Rp)
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )		Hasil Kegiatan (Outcome)		
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	6,250,000.00
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	30,106,000.00
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	23,722,000.00

**BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja					Dana Indikatif 2025 (Rp)	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )		Hasil Kegiatan (Outcome)		
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
						akuntabel dan berkualitas								
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	1 laporan	19,938,450.00
5	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	4,404,500.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja					Dana Indikatif 2025 (Rp)	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )		Hasil Kegiatan (Outcome)		
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	341,112,000.00
5	0	0	2.0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	11,999,900.00
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>80%</b>			<b>697,725,000.00</b>

**BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2025 (Rp)
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )		Hasil Kegiatan (Outcome)		
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Targe t	Tolak Ukur	Target	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	599,334,000.00
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	36,759,000.00
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	30,934,000.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja					Dana Indikatif 2025 (Rp)	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )		Hasil Kegiatan (Outcome)		
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
						akuntabel dan berkualitas								
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	30,698,000.00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar</b>	<b>100%</b>			<b>186,477,204.00</b>
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,						jumlah rekening air, listrik, internet, tlp/fax yang dibayarkan	4 rekening	74,999,364.00

**BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja					Dana Indikatif 2025 (Rp)	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )		Hasil Kegiatan (Outcome)		
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
						akuntabel dan berkualitas								
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	4 orang	111,477,840.00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>			<b>367,768,000.00</b>
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 unit	42,950,000.00

**BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja					Dana Indikatif 2025 (Rp)	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )		Hasil Kegiatan (Outcome)		
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Targe t	Tolak Ukur		Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
						yang bersih, akuntabel dan berkualitas						dibayarkan Pajaknya		
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	290,600,000.00
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	20,750,000.00

**BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah paket rehab gedung kantor	1 paket	13,468,000.00
5	1	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	26					989,867,100.00
								Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	14					
5	1	2	2.0	1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>					Persentase konsistensi program RKPd terhadap program RPD	100%			832,959,200.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)		
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	
											Persenta se Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	19,50 %			
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Konsultasi Publik						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	59,999,700.00
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	129,999,700.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	1	2	2.0 1	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	235 Usulan	17,959,850.00
5	1	2	2.0 1	7	Koordinasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Ditetapkan nya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	3 Dokumen	624,999,950.00
5	1	2	2.0 2		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						<b>Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah</b>	<b>98.50 %</b>		<b>11,429,500.00</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	1	2	2.0 2	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	11,429,500.00
5	1	2	2.0 3		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					<b>Persenta se PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%</b>	<b>93.55 %</b>			<b>58,479,250.00</b>
										<b>Persenta se data capaian kinerja PD yang akuntabel</b>	<b>97,50 %</b>			
5	1	2	2.0 3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	46,090,750.00

**BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
						akuntabel dan berkualitas	Daerah di Kabupaten /Kota							
5	1	2	2.0 3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	12,388,500.00
5	1	2	2.0 4		<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>					<b>Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan</b>	<b>71,43 %</b>		<b>86,999,150.00</b>	
										<b>Tingkat Aksebilitas Data</b>	<b>100%</b>			

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Targe t		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	1	2	2.0 4	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	86,999,150.00
5	1	3			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>									<b>464,412,000.00</b>
5	1	3	2.0 1		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>					<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya</b>	<b>100%</b>			<b>224,799,300.00</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
										Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten selaras bidang sosial budaya	100%			
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	21,307,450.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	1	3	2.0 1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	190,692,100.00
5	1	3	2.0 1	0 8	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	12,799,750.00
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.0 2</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>							<b>Persenta se hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang</b>	<b>100%</b>	<b>13,995,950.00</b>

**BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
										ekonomi				
										Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi	100%			
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	7,996,400.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	1	3	2.0 2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	5,999,550.00
5	1	3	2.0 3		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>						100.0 0%			225,616,750.00
										<b>Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	100.0 0%			

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	1	3	2.0 3	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	47,364,050.00
5	1	3	2.0 3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	59,402,900.00

**BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	1	3	2.0 3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	118,849,800.00
5	5				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>									<b>309,253,350.00</b>
5	5	2			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>Persentase Hasil kelibangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan</b>	<b>95.00%</b>					<b>309,253,350.00</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Targe t		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	5	2	2.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen			99,999,700.00
5	5	2	2.0 2	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	99,999,700.00
5	5	2	2.0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen			109,999,400.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Targe t		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	5	2	2.0 3	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	99,999,700.00
5	5	2	2.0 3	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	9,999,700.00
5	5	2	2.0 4		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>						<b>Persenta se perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</b>	<b>100%</b>		<b>99,254,250.00</b>

**BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	5	2	2.0 4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1,044,000.00
5	5	2	2.0 4	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	87,164,500.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Kinerja	Indikator Kinerja				Dana Indikatif 2025 (Rp)			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan ( Output )			Hasil Kegiatan (Outcome)		
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	
	5	2	2.0	3	4	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	11,045,750.00
<b>Total</b>														<b>8,933,209,700.00</b>	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>						<b>8.933.209.700,00</b>								<b>8.072.474.867,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>8.933.209.700,00</b>							<b>8.072.474.867,00</b>		
	<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>						<b>8.623.956.350,00</b>							<b>7.742.474.867,00</b>		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai IKM Bappeda Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Oleh Inspektorat</i>	-			91,00 Indeks A Kategori	7.169.677.250,00						-	6.296.674.867,00		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian kinerja program / kegiatan Persentase sasaran, progam dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda</i>	-			100 % 100 %	91.624.450,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	91.625.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	14.999.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				6 Laporan	76.625.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		76.625.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</i>	-			95 %	5.335.326.746,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	5.010.933.955,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				38 Orang/bulan	5.026.343.946,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		4.701.862.055,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				38 Dokumen	308.982.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		309.071.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100 %	44.040.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				43 Paket	43.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	1.040.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar</i>	-			100 %	446.715.850,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	501.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	4.804.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	4.379.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	6.250.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				45 Paket	30.106.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	23.722.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				48 Dokumen	19.938.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	4.404.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				120 Laporan	341.112.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	11.999.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</i>	-			80 %	697.725.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	212.925.162,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	599.334.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		172.925.162,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	36.759.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				18 Unit	30.934.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	30.698.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar</i>	-			100 %	186.477.204,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	182.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	74.999.364,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	111.477.840,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		112.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</i>	-			80 %	367.768.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	263.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	42.950.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		39.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				25 Unit	290.600.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		197.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				19 Unit	20.750.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	13.468.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja Nilai evaluasi AKIP</i>	-			14,00 nilai 26,00 %	989.867.100,00						-	995.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat</i>	-			100 % 19.50 %	832.959.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	833.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				2 Berita Acara	59.999.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				2 Berita Acara	129.999.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i>				235 Usulan	17.959.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				3 Dokumen	624.999.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		625.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah</i>	-			98,5 %	11.429.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>				1 Buku	11.429.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%</i>	-			97.50 % 93,55 %	58.479.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				1 Laporan	46.090.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				2 Laporan	12.388.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan Tingkat aksebilitas data</i>	-			71.43 % 100 %	86.999.150,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	87.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>				3 Dokumen	86.999.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		87.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD</i>	-			100 %	464.412.000,00						-	450.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya "Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang sosial budaya"</i>	-			100 % 100 %	224.799.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	224.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				16 Dokumen	21.307.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		112.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3 Dokumen	190.692.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	12.799.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		12.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi</i>	-			100 % 100 %	13.995.950,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				7 Laporan	7.996.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				3 Laporan	5.999.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	-			100 % 100 %	225.616.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	212.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				8 Laporan	47.364.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				8 Laporan	59.402.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				8 Laporan	118.849.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		112.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>309.253.350,00</b>							<b>330.000.000,00</b>	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase Hasil Kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan</i>	-			95,00 %	309.253.350,00						-	330.000.000,00	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Jumlah dokumen penelitian bidang sosial dan kependudukan yang disusun</i>	-			1 dokumen	99.999.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>				1 Dokumen	99.999.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun</i>	-			1 Dokumen	109.999.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>				1 Dokumen	99.999.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>				1 Dokumen	9.999.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</i>	-			100 %	99.254.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>				1 Dokumen	1.044.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>				1 Laporan	87.164.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>				1 Laporan	11.045.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>J U M L A H</b>								<b>8.933.209.700,00</b>							<b>8.072.474.867,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Rencana Kerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kota Payakumbuh secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025

#### **5.2 Rencana tindak lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Payakumbuh, 2024  
KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



**YASRIZAL, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19680307 199009 1 001**







## PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. H. Rky Rasuna Said, SH, Telp. 92779 Telp. 94335 Fax. 92779 Payakumbuh 26231 e-mail : bappedapyk@yahoo.co.id

### GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

Perangkat Daerah Bappeda Kota Payakumbuh

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3			KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6		KOLOM 7	KOLOM 8		KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil		Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal			Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi					
Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  Tujuan : Terlaksananya Musrenbang RKPd Tingkat Kota	- Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni UU nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri no 54 tahun 2010, mengamatakan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan top down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif	Dengan keterlibatan mayoritas laki laki pada musrenbang tersebut maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sebagai berikut :	1. Bappeda belum membuat regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang	1. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dan lain sebagainya;	Terumuskannya RKPd Tahun 2025 yang responsive gender	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan Rancangan RKPd mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (58%) dan perempuan 42%, dari jumlah kehadiran Musrenbang Kota. Semua Perangkat Daerah melampirkan dokumen GAP & GBS pada lampiran rencana kerja dan dan anggaran  outcomes: Meningkatnya kehadiran perempuan, anak dan kaum termarginalkan dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan  output: Meningkatnya Jumlah kehadiran perempuan, anak dan kaum termarginalkan dalam musrenbang;; Meningkat usulan yang diterima di tingkat kecamatan	<i>Input: 1. Peserta musrenbang utusan kecamatan, OPD dan Organisasi Kemasyarakatan dengan memperhatikan responsif gender</i>  <i>output: Jumlah kehadiran perempuan, anak dan kaum termarginalkan dalam musrenbang; Persentase usulan yang diterima di tingkat kecamatan</i>  <i>outcomes: Persentase kehadiran perempuan, anak dan kaum termarginalkan dalam musrenbang; persentase pagu belanja dalam RKPd yang mengakomodir usulan masyarakat</i>				
	Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif											
	Kondisi saat ini pada RKPd 2025 terkait isu - isu gender antara lain peningkatan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknis dan kepemimpinan	Aspek akses : tidak ada masalah	Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan;		Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Payakumbuh						
	Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 peserta yang hadir 270 orang	Aspek Kontrol : peserta didominasi oleh laki-laki; masih rendahnya pengetahuan tentang isu gender dikalangan aparat pemerintah maupun masyarakat; masih rendahnya kepedulian aparat pemerintah maupun masyarakat tentang isu gender.	Partisipasi perempuan belum menunjukkan kebutuhan akibat representasi perempuan dalam musrenbang yang rendah	Masih rendahnya pengetahuan pejabat Perangkat Daerah terkait isu gender.		Penyusunan RKPd 2025						
	Komposisi jenis kelamin yang hadir 58% laki - laki dan 42 % Perempuan	Aspek Manfaat : rendahnya pemahaman tentang isu gender; meskipun sudah memiliki pengetahuan tentang isu gender, namun komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan isu gender pada pelaksanaan program/kegiatannya masih rendah.	Kelompok rentan belum memperoleh akses pembangunan yang setara	Terbatasnya jumlah peserta yang diundang dalam musrenbang dikelurahan		Mengakomodir pelaksanaan musrenbang kelurahan, kecamatan dan Kota						
		Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;		Belum optimalnya Focal Point Gender seluruh Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Payakumbuh								



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. H. Rky Rasuna Said, SH, Telp. 92779 Telp. 94335 Fax. 92779 Payakumbuh 26231 e-mail : bappedapyk@yahoo.co.id

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025**

Perangkat Daerah Bappeda Kota Payakumbuh

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/ Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
<p>Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan : Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Tujuan : Terwujudnya perencanaan yang responsif gender</p>	<p>Permendagri nomor 67 tahun 2011 yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah membentuk Pokja PUG yang salah satu tugasnya menyusun perencanaan yang responsif gender</p>	<p><b>Akses</b> Terbatasnya informasi terkait PUG</p>	<p>Belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas</p>	<p>PUG dianggap tidak menarik dan dianggap hanya mengurus masalah perempuan saja</p>	<p>Terwujudnya perencanaan yang responsif gender</p>	<p>penelaahan GAP dan GBS PD Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG</p>	<p>Perangkat Daerah yang sudah membuat GAP dan GBS</p>	<p><b>Input:</b> Rp. 100.000.000</p> <p><i>output: Penganggaran yang responsif gender</i></p> <p><i>outcomes: Pterwujudnya pengarusutamaan gender di Kota Payakumbuh</i></p>
	<p>Pemahaman Kepala Perangkat Daerah terkait belum optimal</p>	<p><b>Partisipasi</b> Komitmen kepala PD masih kurang ditandai dengan miminya kehadiran pada pelaksanaan sosialisasi atau dalam menindaklanjuti dalam penyusunan GAP dan GBS</p>						
	<p>PUG Masih dianggap sebagai tugas tambahan</p>	<p><b>Manfaat</b> Masih dianggap sebagai beban tambahan Tidak ada punishmen dan reward</p>						

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh



**YASRIZAL, S.Sos, M.Si**

NIP.19680307 199009 1 001



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. H. Rky Rasuna Said, SH, Telp. 92779 Telp. 94335 Fax. 92779 Payakumbuh 26231 e-mail : bappedapyk@yahoo.co.id

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD** : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PAYAKUMBUH**  
**TAHUN ANGGARAN** : **2025**

<b>PROGRAM</b>	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>KEGIATAN</b>	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
<b>SUB KEGIATAN</b>	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
<b>KODE KEGIATAN</b>	5.01.03.2.01.0005
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (<i>Data Pilah Gender</i>).</b></p> <p>Jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2022 berjumlah : 143325, laki-laki 72.186 (50.36%) dan perempuan 71.139 (49.64%). Meskipun jumlah laki-laki tahun 2022 lebih banyak daripada perempuan, namun permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan merupakan isu yang tetap perlu dianalisis. Pelaksanaan Musrenbang yang bertujuan merumuskan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025. Pada tahun 2024 musrenbang RKPD dilaksanakan secara tatap muka dihadiri lebih banyak oleh Laki-laki (58%) dan perempuan dan anak hanya 42%, dari jumlah kehadiran Musrenbang Kota.</p> <p>Program kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat belum responsive gender</p> <p>Kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menyentuh kebutuhan praktis dan strategis</p> <p>Data tentang keterlibatan swasta dalam pemberdayaan masyarakat belum tersedia</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender.</b></p> <p>a. <b>Faktor Kesenjangan</b></p> <p>Dengan keterlibatan mayoritas laki laki pada musrenbang tersebut maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sebagai berikut :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek akses: Terbatasnya informasi terkait PUG</li> <li>• Aspek Kontrol: -</li> <li>• Aspek Manfaat : Masih dianggap sebagai beban tambahan Tidak ada punishmen dan reward</li> <li>• Aspek Partisipasi : Komitmen kepala PD masih kurang ditandai dengan miminya kehadiran pada pelaksanaan sosialisasi atau dalam menindaklanjuti dalam penyusunan GAP dan GBS;</li> </ul> <p><b>b. Faktor Kesenjangan Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUG dianggap tidak menarik dan dianggap hanya mengurus masalah perempuan saja;</li> </ul>		
<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota Tahun anggaran 2023 yang responsif Gender</b>	
		<i>Tujuan</i>	Terwujudnya perencanaan yang responsif gender
		<i>Aktivitas 1</i>	Menambahkan materi tentang penjelasan masalah gender dalam penyusunan dokumen perencanaan
		<i>Sumber daya (Input)</i>	Dana : APBD Panitia : Bappeda Perangkat Daerah Perempuan dan kelompok termajinakan lainnya.
		<i>Output /Sub output 1</i>	Jumlah kehadiran perempuan, anak dan kaum termajinakan dalam musrenbang
	<i>Anggaran</i>	Rp. 100.000.000,-,-	
	<i>SDM</i>	Panitia : 37 orang, L= 14 orang ; P = 23 orang Peserta : 270 orang Narasumber : 9 orang	
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	Laptop 3 unit	
<b>OUTCOOME</b>	<b><u>Rumusan Kinerja Outcome :</u></b>		

Meningkatnya partisipasi perempuan, anak dan kaum termarjinalkan dan berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

**Indikator Kinerja Outcome:**

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

**KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH**



**YASRIZAL, S.Sos, M.Si**  
NIP.19680307 199009 1 001



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. H. Rky Rasuna Said, SH, Telp. 92779 Telp. 94335 Fax. 92779 Payakumbuh 26231 e-mail : bappedapyk@yahoo.co.id

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD** : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PAYAKUMBUH**  
**TAHUN ANGGARAN** : **2025**

<b>PROGRAM</b>	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
<b>KEGIATAN</b>	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
<b>SUB KEGIATAN</b>	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
<b>KODE KEGIATAN</b>	5.01.02.2.01.0005
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (<i>Data Pilah Gender</i>).</b></p> <p>Jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2022 berjumlah : 143325, laki-laki 72.186 (50.36%) dan perempuan 71.139 (49.64%). Meskipun jumlah laki-laki tahun 2022 lebih banyak daripada perempuan, namun permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan merupakan isu yang tetap perlu dianalisis. Pelaksanaan Musrenbang yang bertujuan merumuskan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025. Pada tahun 2024 musrenbang RKPD dilaksanakan secara tatap muka dihadiri lebih banyak oleh Laki-laki (58%) dan perempuan dan anak hanya 42%, dari jumlah kehadiran Musrenbang Kota.</p> <p>Peserta yang diundang pada acara Musrenbang terdiri dari Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh, DPRD Kota Payakumbuh, Lurah, Fasilitator kelurahan, Delegasi dari Kecamatan, Lembaga Non Pemerintah; Perguruan Tinggi, LSM terkait, Asosiasi Profesi, Perbankan dan BUMN di Kota Payakumbuh; Keterwakilan Perempuan dan kelompok termajinalkan lainnya. Dari daftar undangan yang ada keterlibatan laki-laki berkisar 58% dan sisanya perempuan.</p> <p>Dengan pemateri atau narasumber yang juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi 67%. Banyak usulan yang dihasilkan dalam proses di kelurahan lebih banyak sifatnya pembangunan infrastruktur fisik dan prasarana serta sangat minim mengusulkan usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan. Selain itu keterbatasan peserta yang diundang pada musrenbang kota juga menjadi pemicu ketidakterlibatan kaum perempuan dalam mengikuti musrenbang. Mulai Tahun 2019 dokumen GAP GBS sudah menjadi bagian dokumen Rencana</p>

Kerja perangkat daerah.

## **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender.**

### **a. Faktor Kesenjangan**

Dengan keterlibatan mayoritas laki laki pada musrenbang tersebut maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sebagai berikut :

- Aspek akses: tidak ada masalah
- Aspek Kontrol: peserta didominasi oleh laki-laki; masih rendahnya pengetahuan tentang isu gender dikalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat; masih rendahnya kepedulian aparatur pemerintah maupun masyarakat tentang isu gender
- Aspek Manfaat : rendahnya pemahaman tentang isu gender; meskipun sudah memiliki pengetahuan tentang isu gender, namun komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan isu gender pada pelaksanaan program/kegiatannya masih rendah;
- Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;


### **b. Faktor Kesenjangan Internal**

- Bappeda belum membuat regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang
- Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan dalam Musrenbang.
- Partisipasi Perempuan belum menunjukkan kebutuhan akibat representasi Perempuan dalam musrenbang yang rendah
- Kelompok rentan belum memperoleh akses Pembangunan yang setara

### **c. Penyebab Eksternal**

- Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dan lain sebagainya;
- Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan;
- Masih rendahnya pengetahuan pejabat Perangkat Daerah terkait isu gender.
- Terbatasnya jumlah peserta yang diundang dalam musrenbang dikelurahan
- Belum optimalnya Focal Point Gender seluruh Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Payakumbuh

<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota Tahun anggaran 2023 yang responsif Gender</b>	
		<b>Tujuan</b>	Terumuskannya RKPD Tahun 2025 yang responsive gender
		<b>Aktivitas 1</b>	Melakukan klasifikasi antara laki-laki dan perempuan pada daftar hadir musrenbang
		<b>Aktivitas 2</b>	Menambahkan materi tentang penjelasan masalah gender di sesi pemaparan pada Musrenbang Kota
		<b>Aktivitas 3</b>	Menambah kuota peserta bagi unsur keterwakilan perempuan menjadi minimal 3 orang peserta
		<b>Sumber daya (Input)</b>	Dana : APBD Panitia : Bappeda Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh, DPRD Kota Payakumbuh, Lurah, Fasilitator kelurahan, Delegasi dari Kecamatan, Lembaga Non Pemerintah; Perguruan Tinggi, LSM terkait, Asosiasi Profesi, Perbankan dan BUMN di Kota Payakumbuh; Keterwakilan Perempuan dan kelompok termajinalkan lainnya.
		<b>Output /Sub output 1</b>	Jumlah kehadiran perempuan, anak dan kaum termajinalkan dalam musrenbang
	<b>Anggaran</b>	Rp. 130.000.000,-,-	
	<b>SDM</b>	Panitia : 37 orang, L= 14 orang ; P = 23 orang Peserta : 270 orang Narasumber : 9 orang	
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	Laptop 3 unit	

<b>OUTCOOME</b>	<p><b><u>Rumusan Kinerja Outcome :</u></b> Meningkatnya kehadiran perempuan, anak dan kaum termarjinalkan dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.</p> <p><b><u>Indikator Kinerja Outcome:</u></b> Jumlah berita cara .</p>
<p><b>KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH</b></p>  <p><b><u>YASRIZAL,S.Sos,M.Si</u></b> NIP.19680307 199009 1 001</p>	

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks kualitas perencanaan	90,5%
2	Meningkatnya capaian indeks inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kategori Tingkat inovasi daerah	Inovatif
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A

Payakumbuh, Januari 2024

**KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH**



**YASRIZAL, S.Sos, M.Si**

NIP. 19680307 199009 1 001